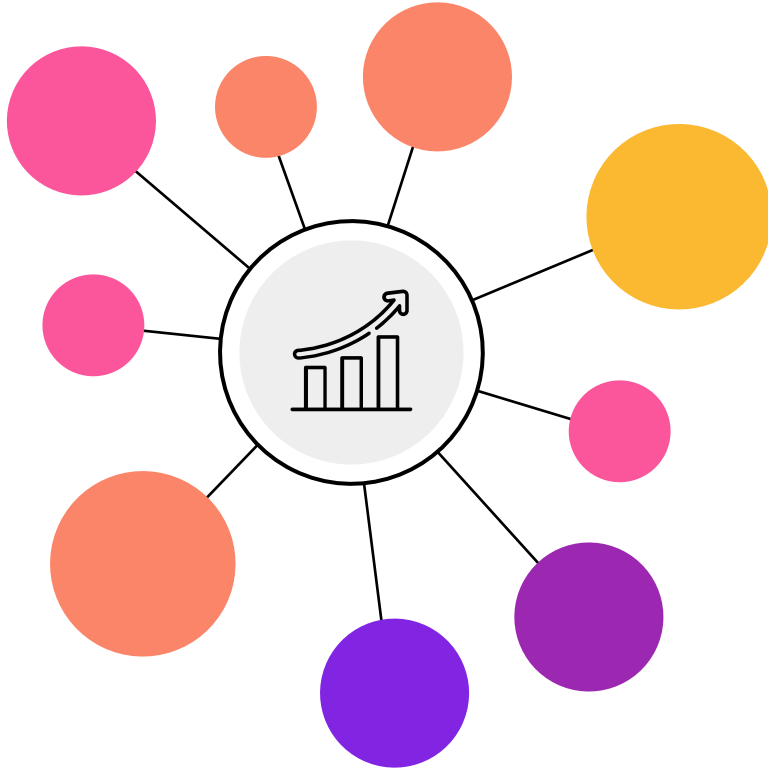




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN



PROSES BISNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TAHUN 2022

MISI 1

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Unggulan Daerah

MISI 2

Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berakhlak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman

MISI 3

Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan

MISI 4

Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram.

MISI 5

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi

VISI MISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021-2026

VISI

" TERWUJUDNYA
KEJAYAAN
LAMONGAN YANG
BERKEADILAN"

KETERKAIATAN RPJMD DENGAN RENSTRA BPKAD

RPJMD			RENSTRA BPKAD				
MISI 5	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal	Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Opini BPK	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
						Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	
						Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	
						Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

CASCADING PERENCANAAN BPKAD LAMONGAN

Tujuan RPJMD	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa			
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			
Sasaran RPJMD	Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal			
Indikator Sasaran	Opini BPK			
Tujuan BPKAD	Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah			
Indikator Tujuan	Opini BPK			
Sasaran BPKAD	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal			
Indikator Sasaran	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset
Program BPKAD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program	Prosentase Pelaksanaan Penganggaran APBD yang tepat waktu	Prosentase Pelaksanan Pelayanan Penatausahaan Sesuai Standart Daerah	Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.
Kegiatan BPKAD	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan	jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun
Sub Kegiatan	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Inventarisasi Barang Milik Daerah
Indikator Sub Kegiatan	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD

CASCADING KINERJA BPKAD LAMONGAN

Kepala Daerah

Kepala Badan

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Staf

Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal

Indikator:

1. Prosentase Akurasi penganggaran APBD
2. Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target
3. Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP
4. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset

Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun

Terwujudnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen laporan BUD yang disusun

Terwujudnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

INDIKATOR :
jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun

Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

INDIKATOR :
Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun

Terwujudnya Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

INDIKATOR :
Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD

Terwujudnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

INDIKATOR :
Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu

Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

INDIKATOR:
Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten

Terwujudnya Inventarisasi Barang Milik Daerah

INDIKATOR :
Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD

Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi RKA APBD dan Perubahan APBD

INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Verifikasi RKA APBD dan Perubahan APBD

Terlaksananya pelayanan pencairan belanja SKPD

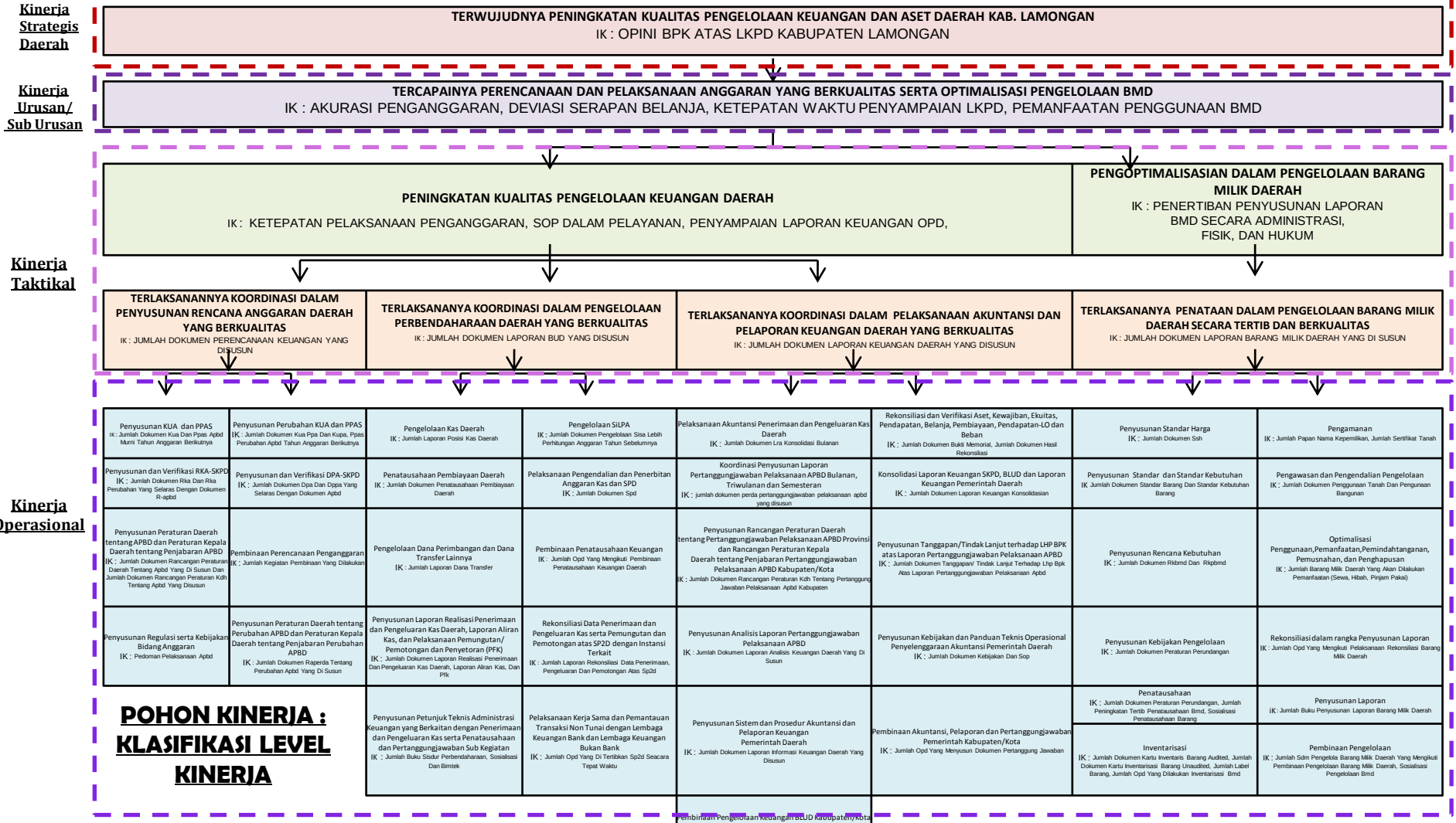
INDIKATOR :
Jumlah Dokumen Penerbitan SP2D

Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun

INDIKATOR :
Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun

Tersedianya Kelengkapan Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan dalam kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

INDIKATOR :
Jumlah laporan hasil konsolidasi Laporan BMD berdasarkan hasil rekon tiap Semester dan Tahunan



SKEMA PROSES BISNIS BPKAD LAMONGAN

PROSES BISNIS MANAJEMEN

PENGELOLAAN KINERJA

KEPATUHAN INTERNAL

MITIGASI RESIKO

PROSES BISNIS INTI



PROSES BISNIS PENDUKUNG

PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KETERSEDIAAN SDM

ORGANISASI

SARANA
PRASARANA

PROSES BISNIS MANAJEMEN

Pengelola Kinerja :

Menyelaraskan SOP sesuai dengan visi dan misi. Dalam Pengelolaan Kinerja BPKAD selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal :

Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Mitigasi Resiko:

Memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul



Evaluasi
Kinerja



Perencanaan
Kinerja

Pengelolaan
Kinerja

Pelaporan
Kinerja

Pengukuran
Kinerja



PROSES BISNIS INTI BPKAD LAMONGAN

01

PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH



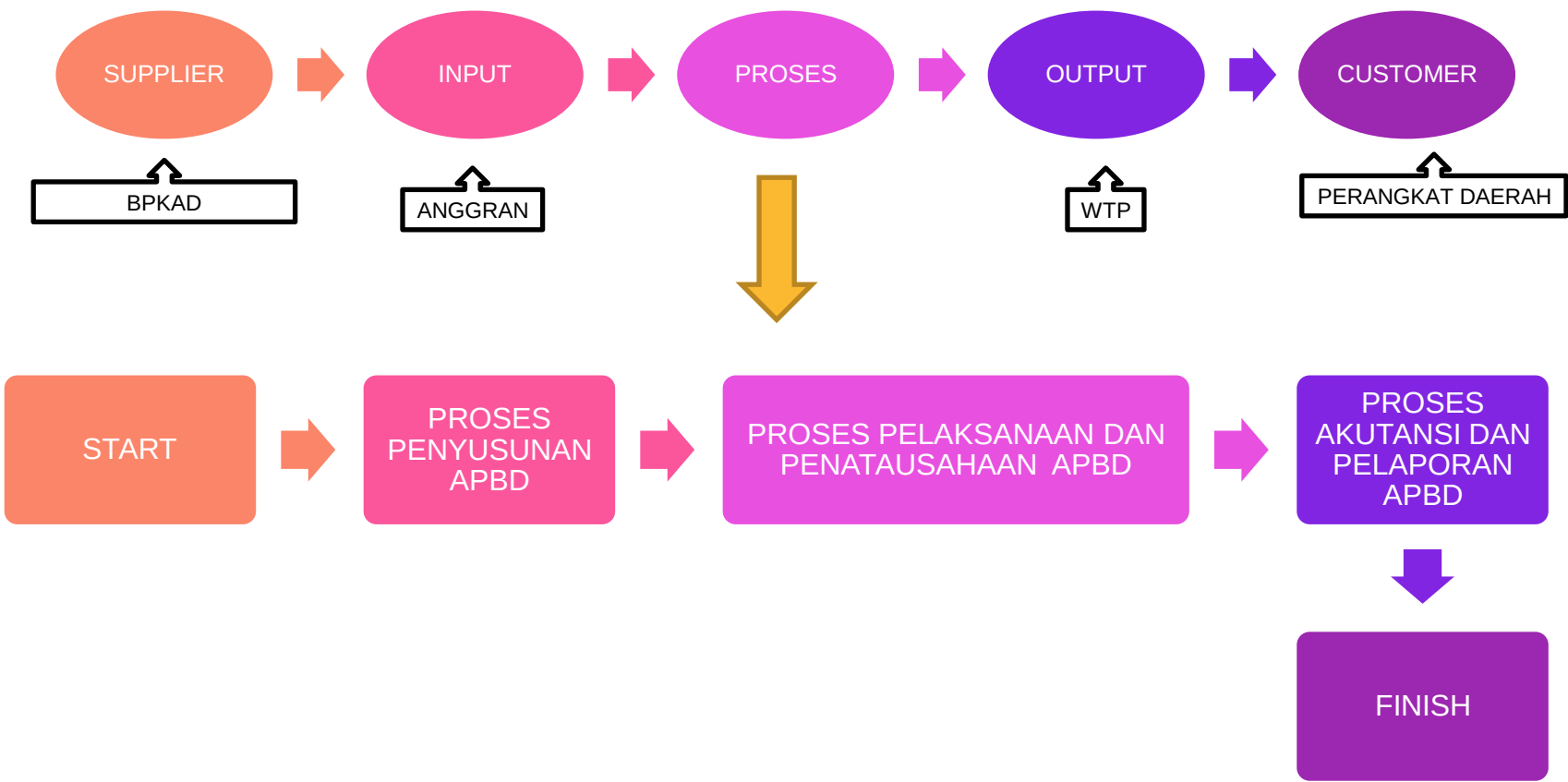
02

PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

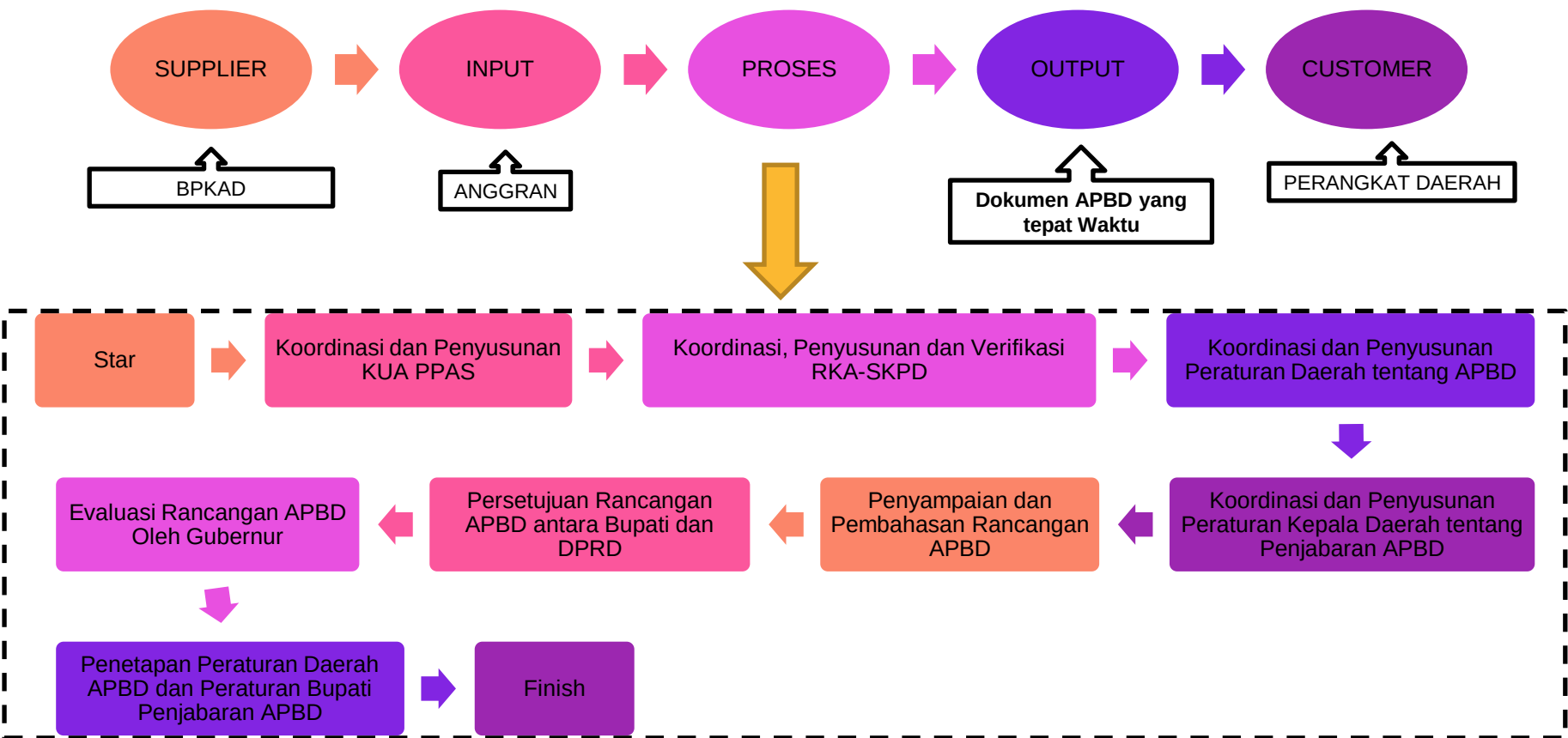
LEVEL I



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL II

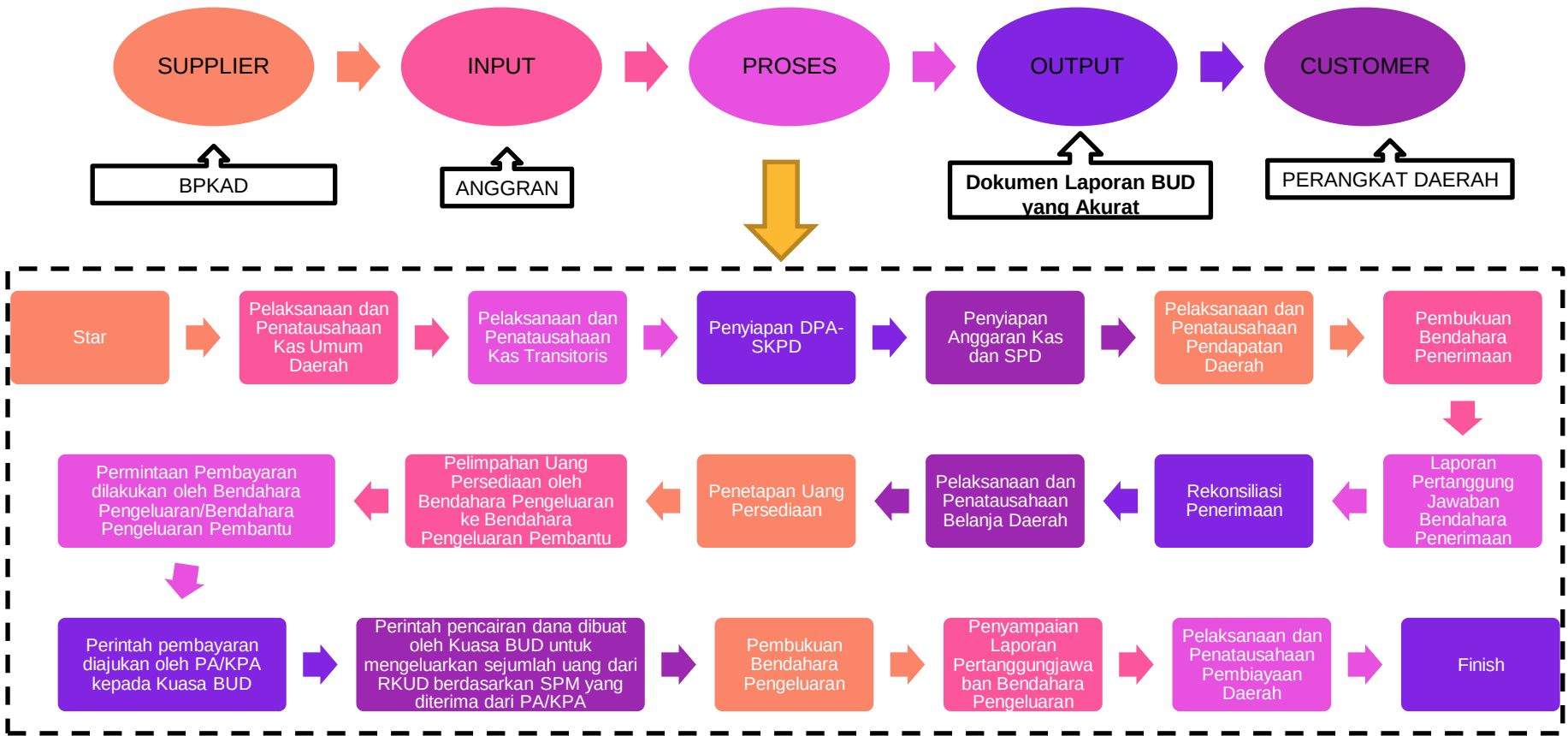
PROSES PENYUSUNAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL II

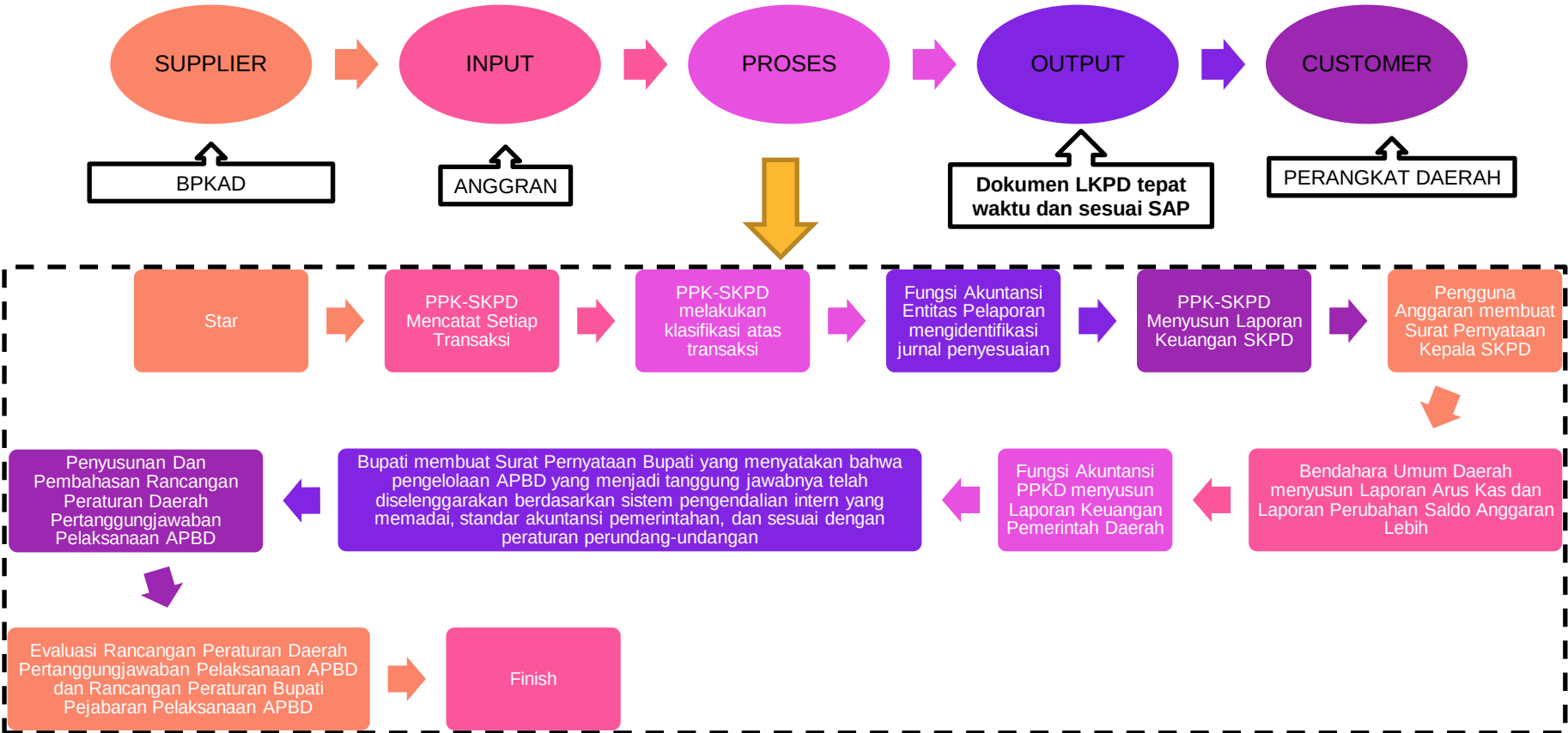
PROSES PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

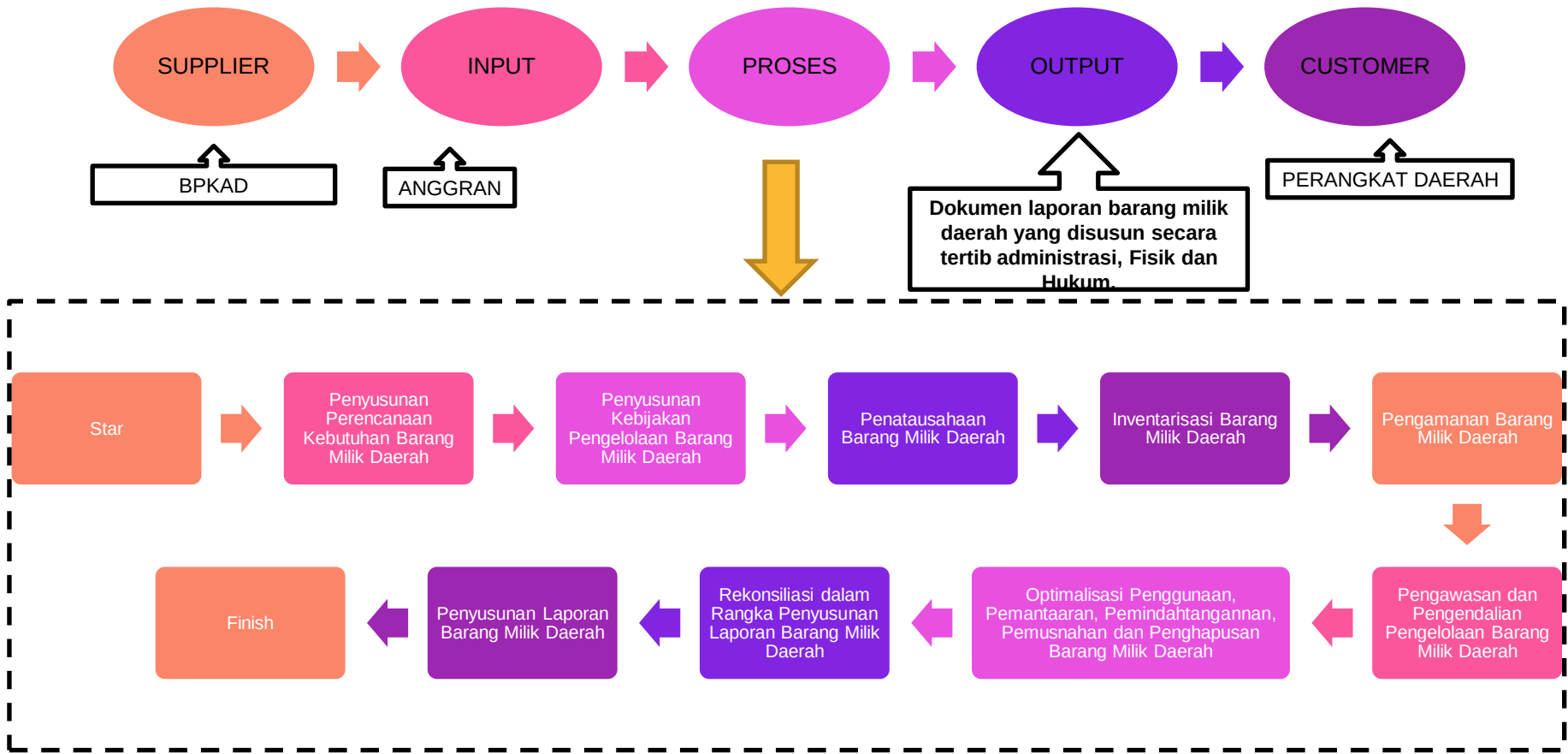
LEVEL II

PROSES AKUTANSI DAN PELAPORAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

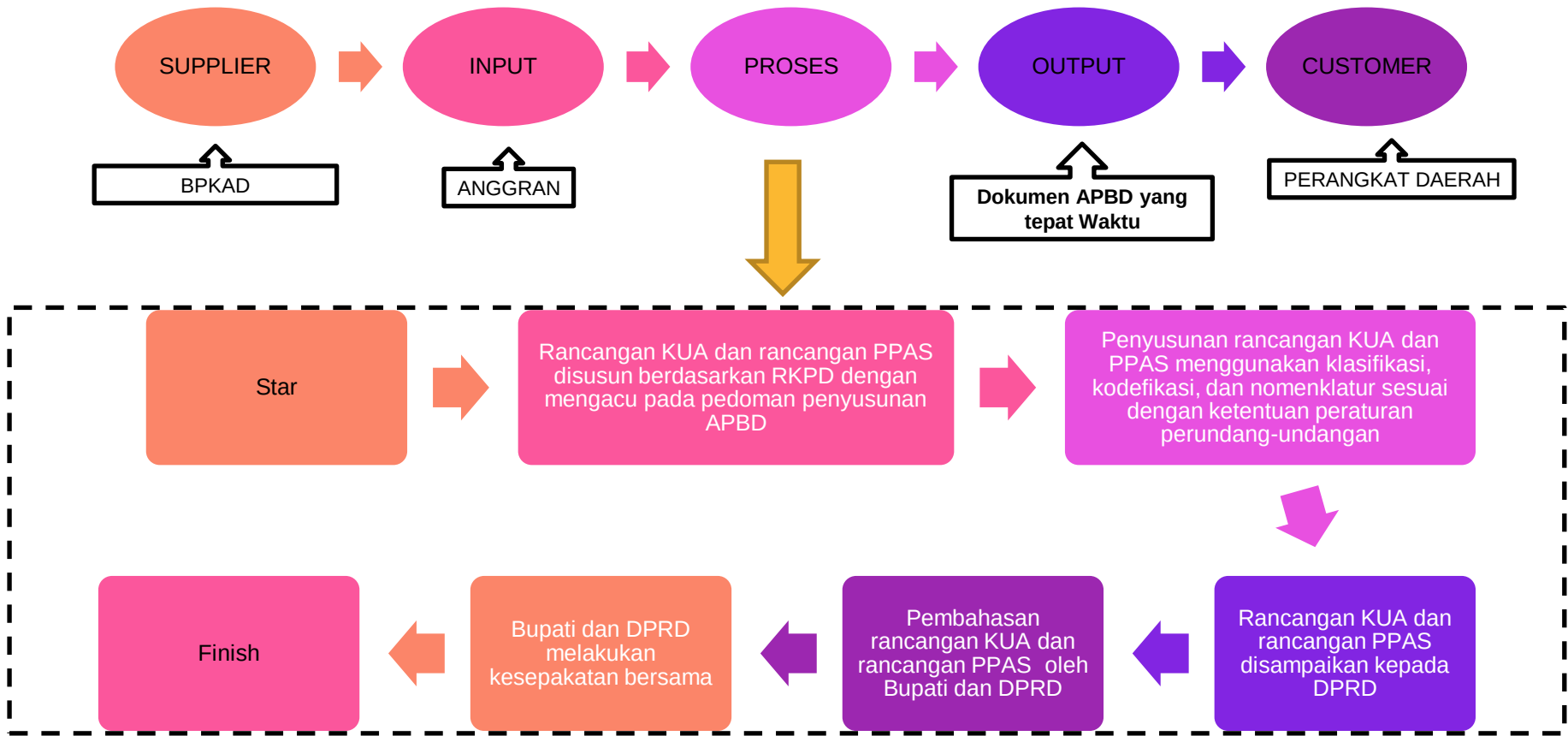
LEVEL II



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

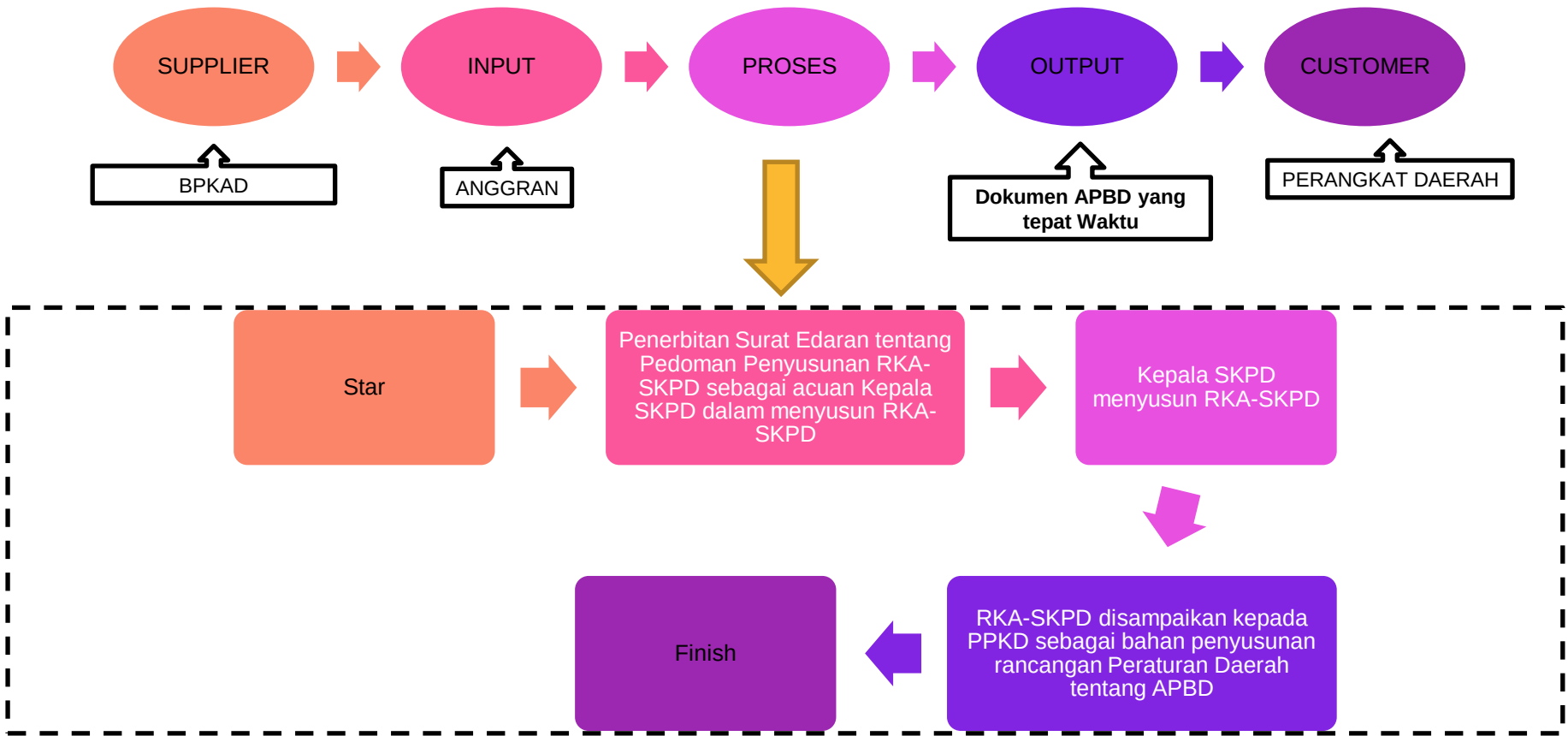
Proses Penyusunan KUA PPAS



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

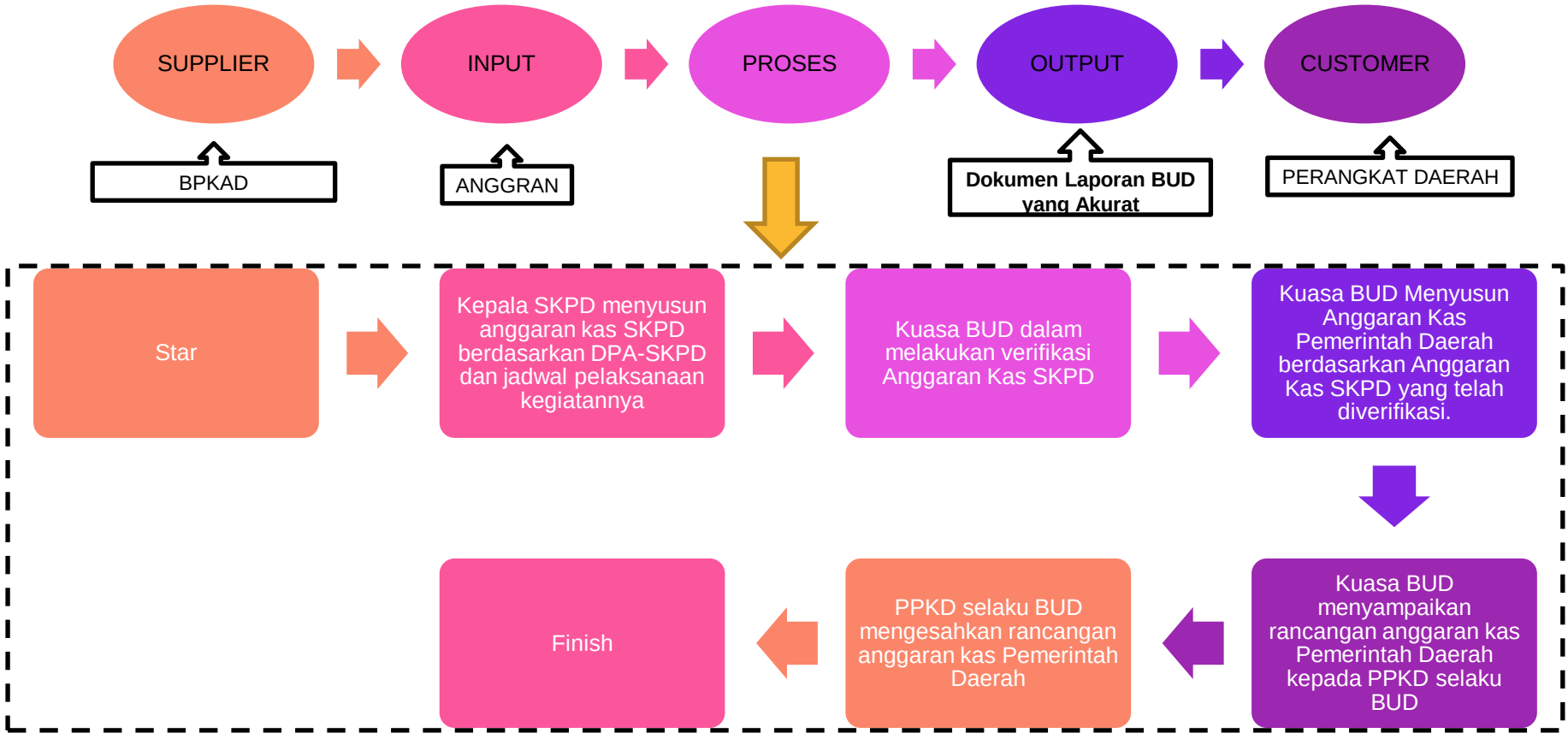
PROSES PENYUSUNAN RKA-SKPD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

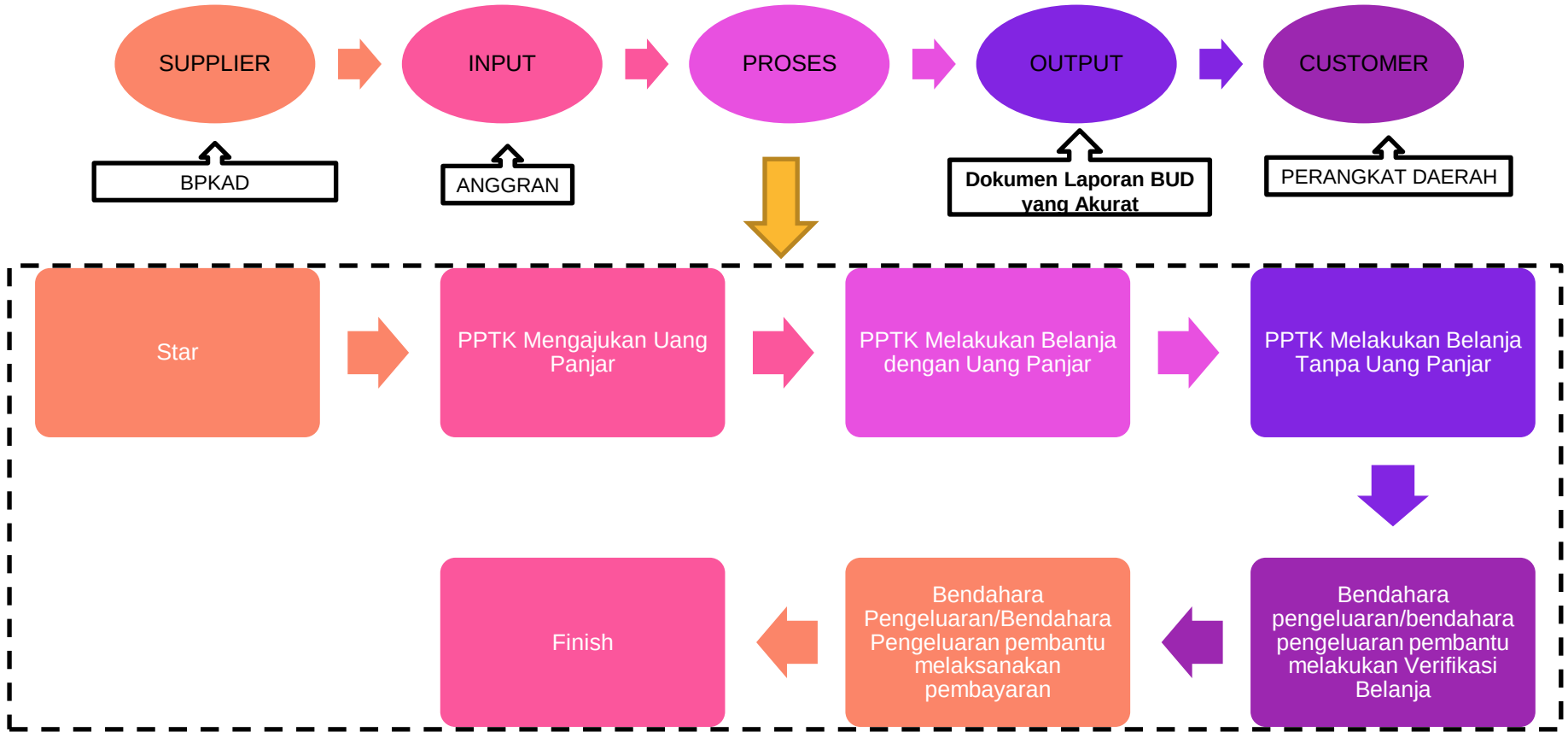
PROSES PENYIAPAN PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

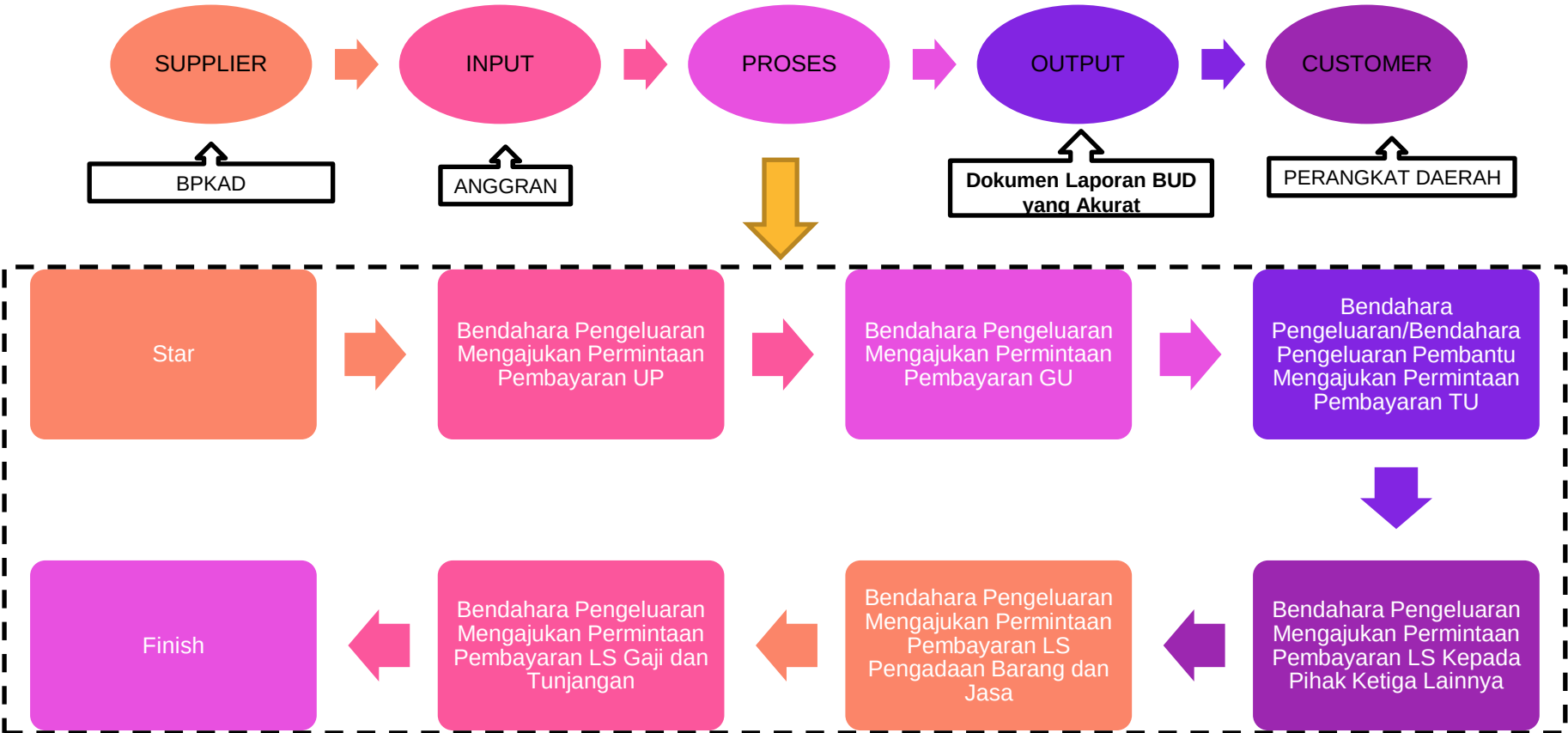
LEVEL III



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PERMINTAAN PEMBAYARAN

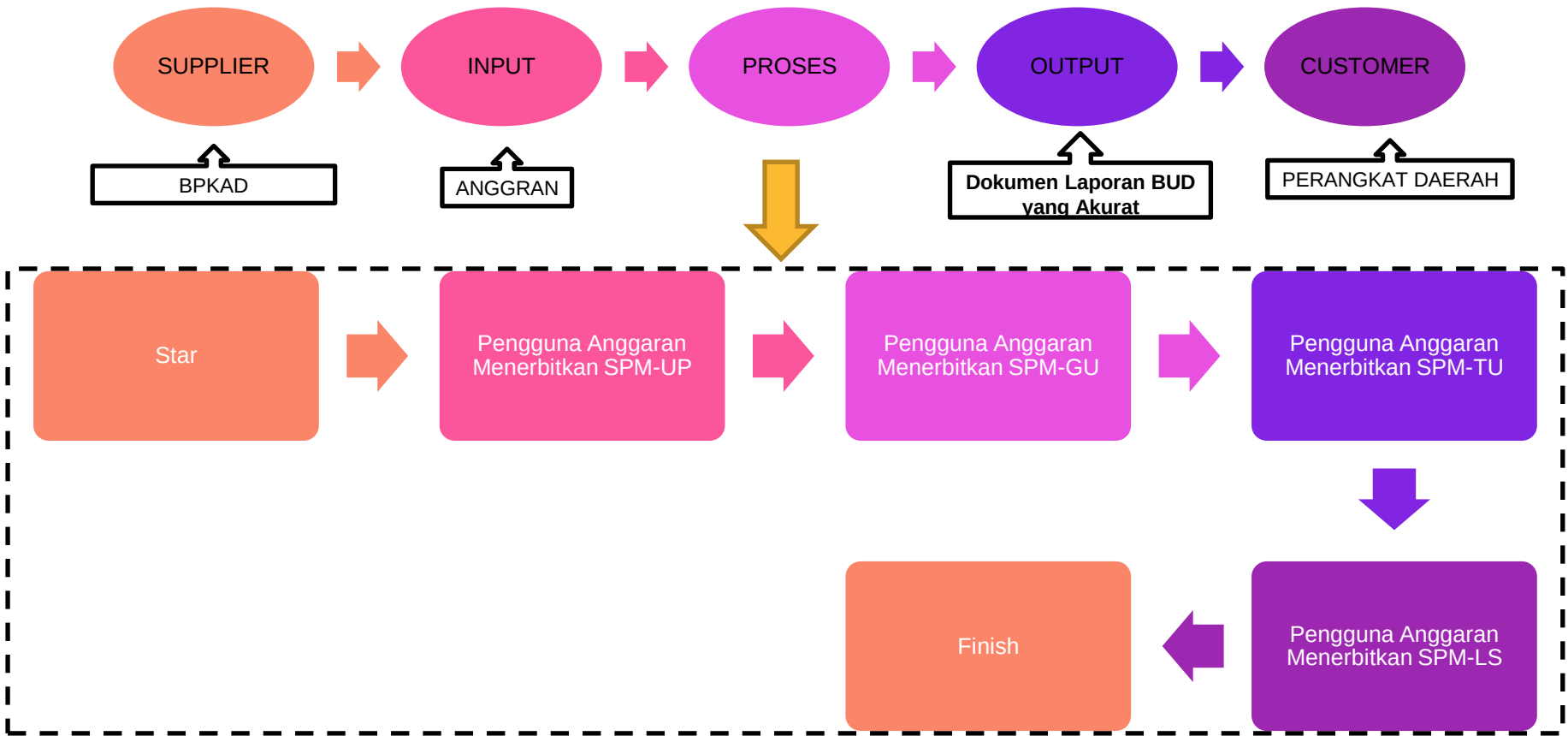
LEVEL III



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PERINTAH MEMBAYAR

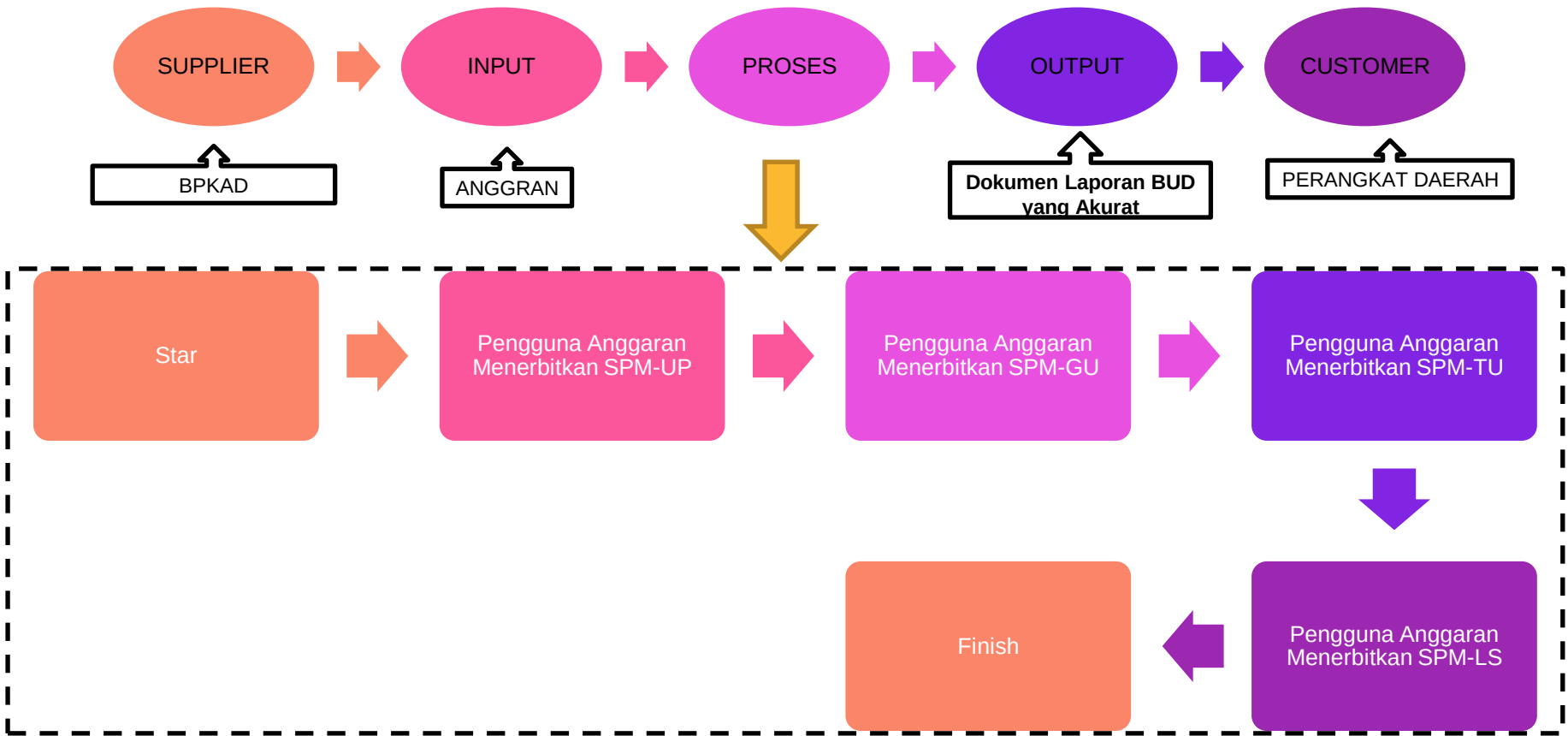
LEVEL III



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

PROSES PERINTAH MEMBAYAR

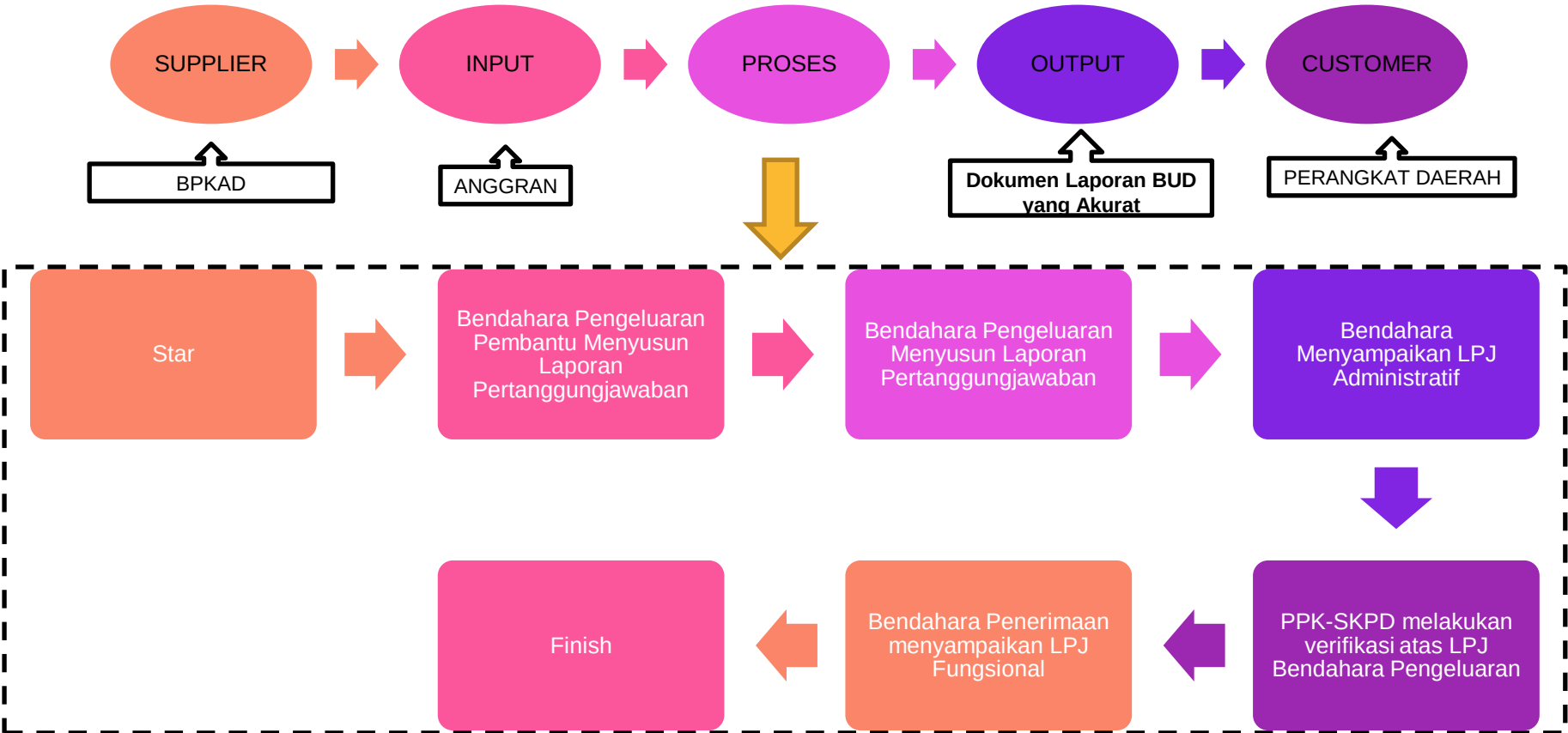
LEVEL III



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

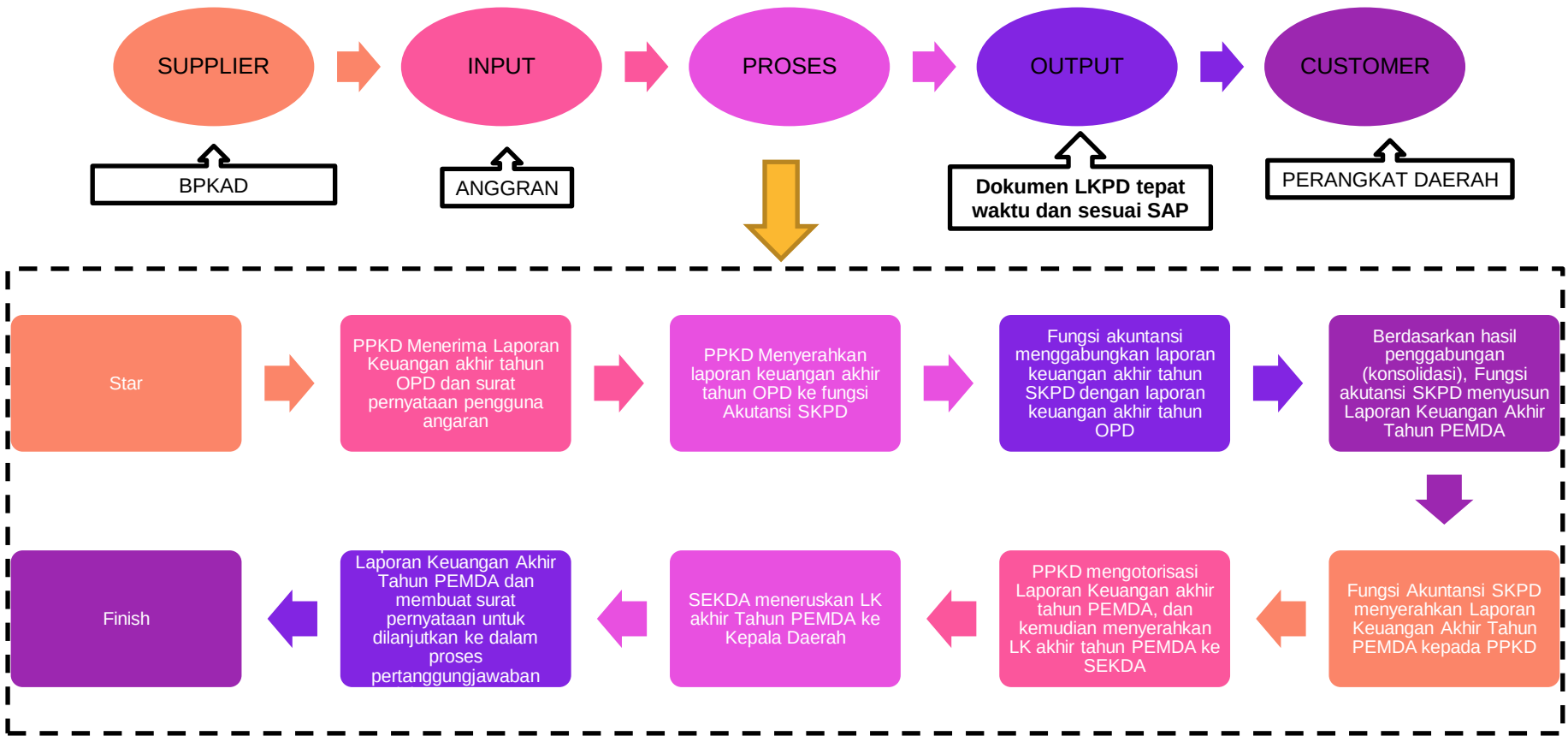
PROSES PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL II

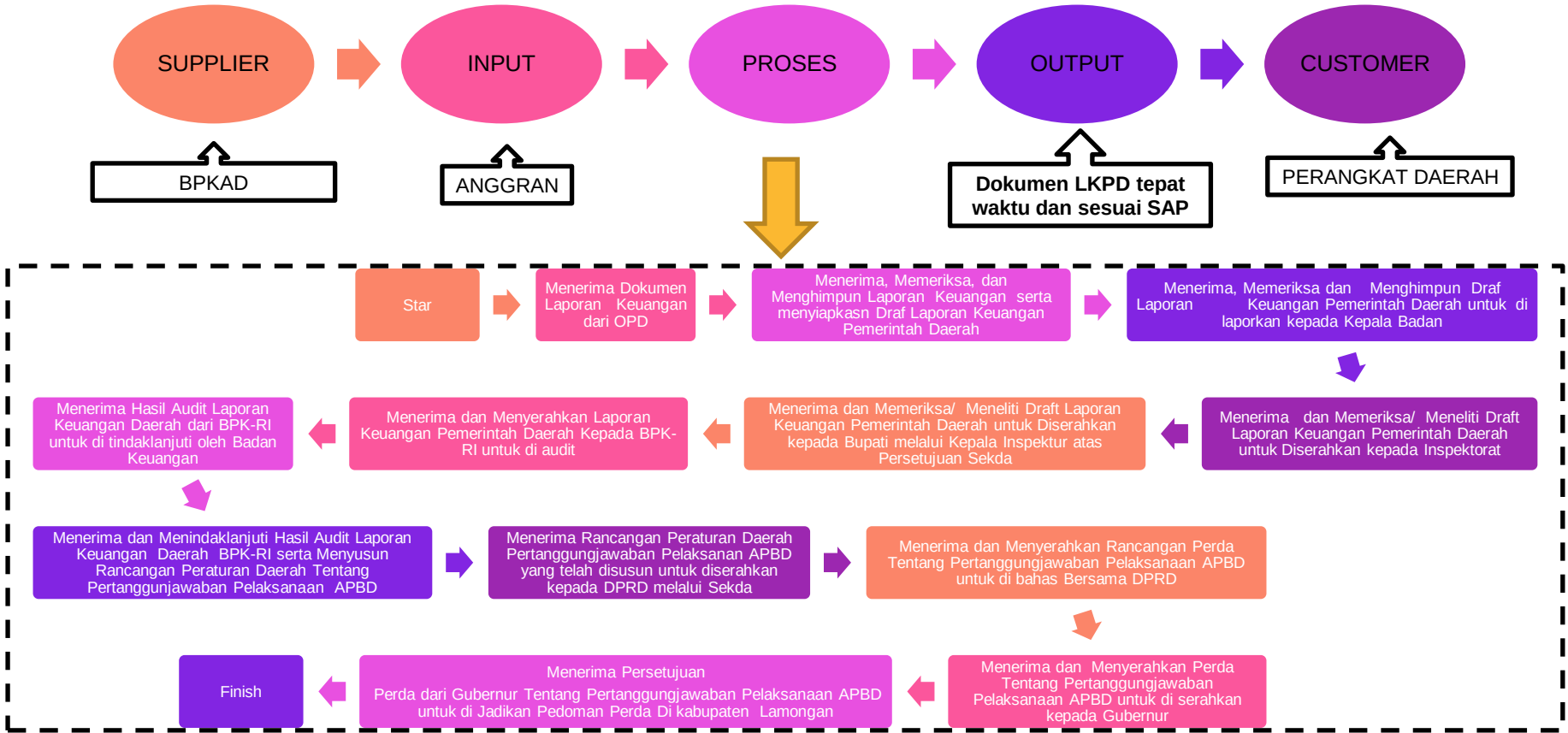
PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN



PROSES BISNIS PENGELOLAAN KEUANGAN

LEVEL III

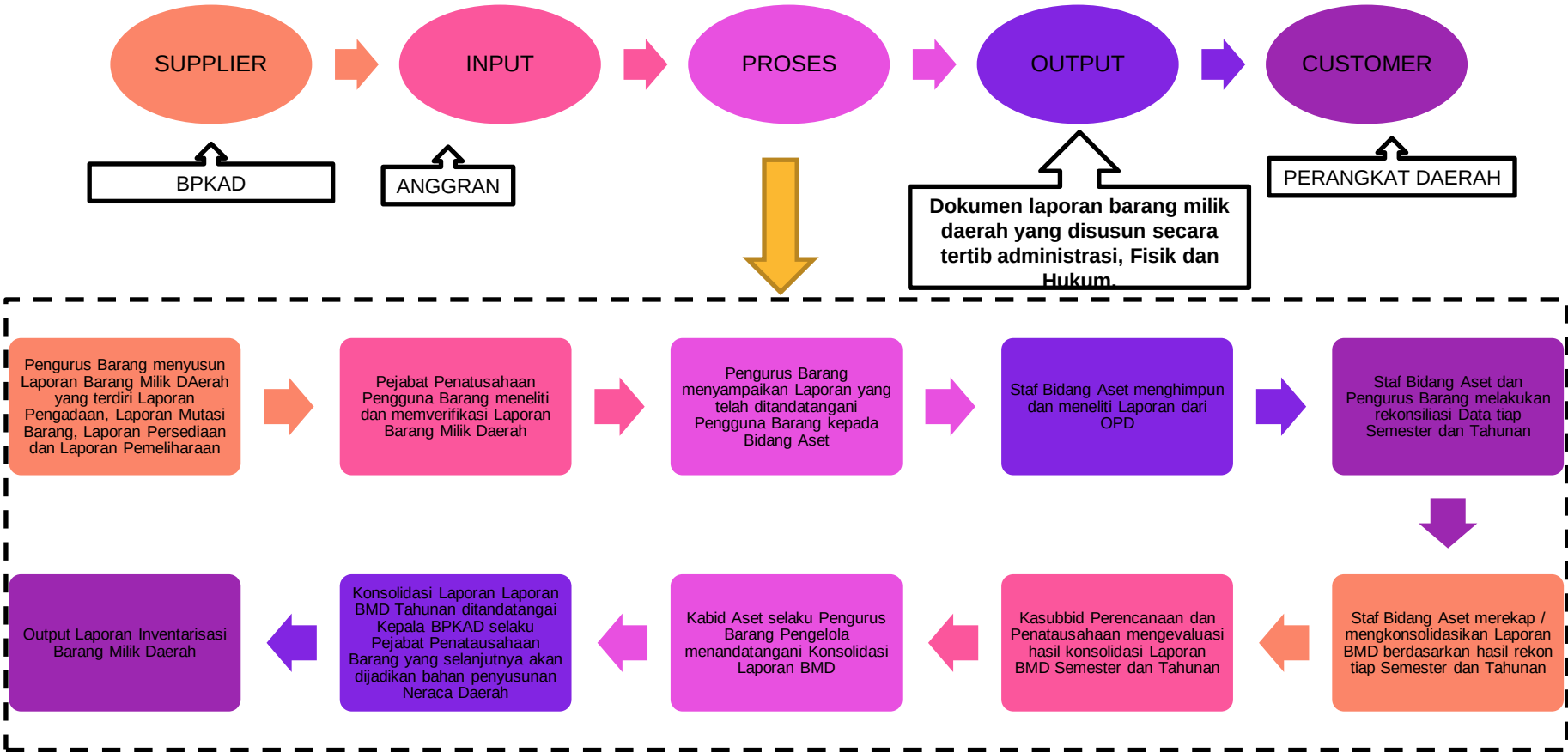
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD



PROSES BISNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

LEVEL III

PROSES INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH



TERIMAKASIH